



MUSRENBANG KELURAHAN

Muncul Persoalan Regulasi hingga Kendala SIPD

YOGYA (MERAPD) - Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di tingkat kelurahan di Kota Yogyakarta masih menghadapi sejumlah persoalan mendasar. Mulai dari belum adanya payung hukum bagi beberapa lembaga masyarakat, kendala teknis dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), hingga keterbatasan sumber daya manusia di kelurahan menjadi tantangan yang perlu segera ditangani.

Berdasarkan hasil pemantauan lapangan di 14 kemandren dan 45 kelurahan, ditemukan adanya lembaga masyarakat yang aktif berkontribusi dalam pembangunan wilayah, namun belum memiliki legitimasi formal. Ketua Komisi A DPRD Kota Yogyakarta, Susanto Dwi Antoro, menyebut regulasi yang ada saat ini baru mengakui enam kelembagaan resmi, yakni Pengurus Kampung, RT, RW, LPMK, PKK, dan Bank Sampah.

"Fakta di lapangan menunjukkan ada lembaga lain yang memiliki peran penting, seperti kampung wisata, kampung budaya, serta lembaga

tematik lainnya, namun belum mendapatkan legitimasi yang kuat," ujarnya, Minggu (15/2).

Ketiadaan payung hukum tersebut dinilai berpotensi menghambat peran lembaga masyarakat dalam mendukung pembangunan berbasis komunitas. Oleh karena itu, diperlukan langkah untuk memberikan

legitimasi formal agar kontribusi mereka dapat diakomodasi secara berkelanjutan.

Selain persoalan regulasi, kendala teknis pada sistem SIPD juga menjadi sorotan. Beberapa usulan masyarakat yang bersifat mendasak dan spesifik wilayah tidak dapat diakomodasi karena tidak ter-

cantum dalam kamus usulan sistem tersebut. "Usulan bottom-up yang sangat urgen bagi masyarakat terkadang tidak linier dengan opsi yang ada di sistem. Akibatnya, aspirasi tersebut tidak bisa ter-input," kata Susanto.

Kondisi ini, menurut Wakil Ketua Komisi A DPRD Kota Yogyakarta Indaruwanto Eko Cahyono, kerap memaksa perangkat wilayah menggunakan kembali usulan lama agar tetap tercatat dalam sistem. "Kadang kala usulan dari masyarakat itu tidak ada dalam kamus SIPD, sehingga harus digandengkan dengan yang sudah ada. Akibatnya, banyak usulan hanya copy-paste dari tahun ke tahun," jelasnya.

Persoalan lain yang muncul adalah belum adanya kejelasan mekanisme pengajuan Pokok Pikiran (Pokir) DPRD dalam struktur Musrenbang. Padahal, usulan tersebut merupakan bagian dari proses pengawasan dan pengawalan pembangunan berbasis kebutuhan wilayah. Di sisi lain, beban kerja aparat kelurahan juga dinilai semakin meningkat, namun tidak di-

imbangi dengan jumlah sumber daya manusia yang memadai. Kondisi ini diperparah dengan komposisi usia aparat yang sebagian sudah mendekati masa pensiun.

Anggota Komisi A DPRD Kota Yogyakarta, Marwoto Hadi, menilai kondisi tersebut dapat memengaruhi efektivitas administrasi dan pelaporan. "Beban administrasi cukup kompleks, sementara sebagian aparat sudah memasuki usia lanjut, sehingga proses digitalisasi dan pelaporan menjadi kurang optimal," ujarnya.

Selain itu, banyak usulan masyarakat yang belum terealisasi dalam beberapa tahun terakhir, sehingga terus diajukan kembali dalam Musrenbang berikutnya. Situasi ini dinilai perlu direspons dengan mekanisme antrean yang jelas serta transparansi kepada masyarakat terkait status usulan mereka. Saat ini, kajian terkait kebutuhan sumber daya manusia di tingkat kelurahan tengah dilakukan untuk memastikan pelayanan publik dan proses pembangunan dapat berjalan optimal. (C-12)



Musrenbang tingkat kelurahan di Kota Yogyakarta.

MERAPI-WAHYU TURI K

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 27 Mei 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005